

**GERAKAN PERLAWANAN PATANI UNITED LIBERATION  
ORGANIZATION (PULO) TERHADAP PEMERINTAH THAILAND  
TAHUN 1968-1980**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

**MR.Furkorn Chemaë**

NIM: 12120069

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-506/Un.02/DA/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : GERAKAN PERLAWANAN PATANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION (PULO) TERHADAP PEMERINTAH THAILAND TAHUN 1968-1980

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mr. FURKORN CHEMAE  
Nomor Induk Mahasiswa : 12120069  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Soraya Adnani, M.Si.  
NIP. 19650928 199303 2 001

Penguji I

Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
NIP. 19710403 199603 1 001

Penguji II

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.  
NIP. 19700216 199403 2 013

Yogyakarta, 11 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
DEKAN



Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.  
NIP. 19600224 198803 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN

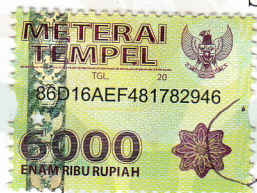
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr. Furkorn Chemaë  
NIM : 12120069  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



**Mr. Furkorn Chemaë**

NIM: 12120069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**GERAKAN PERLAWANAN *PATANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION*  
(PULO) TERHADAP PEMERINTAHAN THAILAND TAHUN 1968-1980 M**

yang ditulis oleh:

Nama : Mr. Furkorn Chemaie  
NIM : 12120069  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Dosen Pembimbing,



**Dra. Soraya Adnani, M.Si**

NIP: 19650928 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (Q.S. Ali Imran 110).”<sup>1</sup>

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang”

(Imam Syafi’i)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>Pustaka Al Hanan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: PT Riels Grafika, 2009), hlm. 64.

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

Almamater Tercinta Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua Orang Tuaku: Abah Abdulfarid Chemaë dan Mami Habeebah

Keluarga kecilku (Adik Fadel, Adik Firdaw dan Adik Fadear)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul tentang Gerakan Perlawanan *Patani United Liberation Organization* (PULO), dikarenakan PULO merupakan organisasi yang populer diseluruh negeri Thailand bahkan pemerintah Thailand memandang bahwa gerakan PULO sudah bertaraf internasional dan PULO juga adalah oraganisasi perjuangan terbesar di Thailand hingga saat ini. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya PULO, bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap Pemerintah Thailand dan apa saja yang telah di capai dalam periode tahun 1968 hingga 1980. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi dibentuknya PULO, memahami gerakan-gerakan perlawanannya, serta capaian yang telah diraih oleh PULO.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teori konflik dengan metode historis yang melalui empat tahap yaitu pertama Heuristik, yaitu pengumpulan sumber baik tertulis maupun lisan. Pada tahap ini terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu: studi dokumentasi dan wawancara. 2) Verifikasi, yaitu mencari keaslian sumber. Kritik sumber ada dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern untuk menilai wujud fisik sedangkan kritik intern untuk menilai isi sumber. 3) interpretasi, yaitu usaha menafsirkan fakta melalui analisis dan sintesis. 4) Historiografi, yaitu penulisan sejarah yang bertujuan merangkai fakta menjadi penjelasan sejarah yang mudah dipahami.

Sebagai hasilnya ditemukan bahwa adanya kebijakan integrasi yang dilakukan Pemerintah Thailand terhadap wilayah Patani telah mendorong lahirnya gerakan perlawanan termasuk PULO. Gerakan perlawanan yang dilakukan PULO menggunakan cara kekerasan dan tanpa kekerasan. Sementara itu, Pemerintah Thailand merespon perlawanan PULO tersebut dengan cara militer dan akomodatif. Sedangkan capaian PULO adalah membuat Pemerintah Thailand kembali membicarakan keinginan Patani yaitu adanya pemerintahan otonomi bagi wilayah Patani dan Thailand Selatan secara luas.

**Kata kunci:** *Patani, PULO, Thailand*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Agung, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Atas segala limpahan, nikmat, dan anugerah yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Baginda Rasulullah saw., manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum). penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Penulis haturkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis, Abah Abdulfarid dan Mami Habeebah yang selalu penulis cintai, hormati, dan banggakan. Merekalah yang membesarkan, mendidik, mendoakan setiap waktu, dan senantiasa mendukung pendidikan penulis selama di tanah rantau. Kalau bukan karena kerelaan dan izin dari Abah dan Mami, jangankan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, menjejakkan tanah Yogyakarta pun

tidak mungkin terjadi. Semoga Allah swt., selalu mencurahkan nikmat kesehatan dan kebahagiaan di dalam hidup Abah dan Mami.

2. Penulis haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dra. Soraya Adnani, M,Si. yang telah berkenan menjadi pembimbing penulis. Di tengah-tengah kesibukannya yang cukup padat, masih saja selalu menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis. Semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah swt., atas pengabdianya.
3. Penulis haturkan terimakasih kepada bapak Musa selaku Pembimbing akademik (PA) yang membimbing dalam perkuliahan mulai dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Penulis haturkan terimakasih kepada segenap dosen dan staff akademik fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang penulis menerima berbagai ilmu pengetahuan dari fakultas dan lembaga-lembaga bidang yang berkaitan.
5. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan SKI angkatan 2012. Semua kebersamaan selama menimba ilmu tidak akan pernah penulis lupakan. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku (Ayu innakaromatika, Milawati, indi Rahmawati) yang tidak hanya memberikan warna-warni dalam kehidupan selama di tanah rantau, tetapi turut memberi energi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua dapat senantiasa menjaga tali silaturahmi sampai kapan pun dan selalu berbagi kebahagiaan setiap saat.

6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di keluarga besar Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand Di Indonesia (IPMITI) yang selalu memberi semangat bagi penulis dalam menghadapi segala kesulitan.
7. Terimakasih kepada teman dekatku yang tercinta Sairanee Charaka yang selama ini selalu mendampingi, memberi perhatian, semangat dan selalu menjadi inspirasi bagiku.
8. Terimakasih kepada adik-adikku tercinta Abid Nuereng, Asee Umasatae dan kakaku tercinta Lukmanulhakeem Hilea dan Mas Fredy yang selalu mendampingi dan memberi semangat, dukungan baik bagiku dalam menghadapi segala masalah selama berada di tanah jawa ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini dipertanggungjawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 27 Juli 2017  
Penulis,

Mr. Furkorn Chemaie  
NIM: 12120069

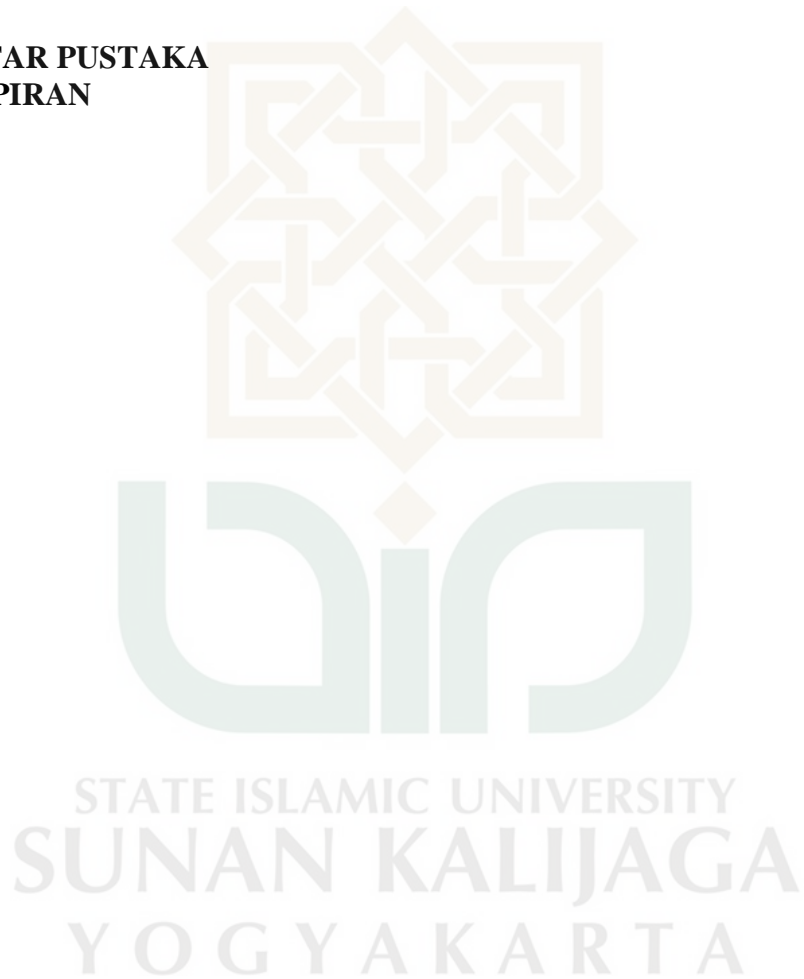


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND TERHADAP WILAYAH THAILAND SELATAN PRA_PERGERAKAN</b> .....	18
A. Upaya Integrasi Pemerinta THailand .....	18
1. Integrasi Patani ke Thailand .....	18
2. Kebijakan Integrasi Patani Ke Dalam Pemerintahan Thailand .....	23
B. Dampak Kebijakan Integrasi Pemerintah Thailand Terhadap Masyarakat Melayu-Patani.....	34
<b>BAB III GERAKAN PERLAWANAN PATANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION (PULO) TERHADAP PEMERINTAH THAILAND TAHUN 1968-1980</b> .....	42
A. Sejarah Berdirinya <i>Organisasi Patani United Liberation Organization</i> (PULO) .....	43
B. Bentuk-Bentuk Perlawanan PULO Terhadap Pemerintah Thailand.....	51
1. Perlawanan Dengan Kekerasan.....	52
2. Perlawanan Tanpa Kekerasan .....	57
<b>BAB IV RESPON PEMERINTAH THAILAND DAN KEBERHASILAN PERLAWANAN PULO</b> .....	64

A. Respon Pemerintah Thailand Terhadap Gerakan Perlawanan PULO .....	64
1. Respon Pemerintah Thailand Melalui Operasi Militer .....	64
2. Respon Akomodatif Pemerintah Thailand .....	68
B. Keberhasilan Gerakan Perlawanan PULO .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan salah satu negara diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang secara geografis merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan China, antara daratan India sampai laut China.<sup>1</sup> Hal ini menjadikan Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama. Kerajaan Persatuan Thai dibentuk pada pertengahan abad ke14 yang diikenal sebagai Kerajaan Siam sampai dengan tahun 1939. Secara historis, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa.<sup>2</sup>

Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha Theravada, sedangkan Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Budha.<sup>3</sup> Pada tahun 1960, Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah Selatan, antara lain Provinsi Pattani (78%), Yala (61%), Narathiwat (78%), dan Satun (83%). Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.<sup>4</sup>

Wilayah Thailand Selatan, terutama provinsi Patani (Pattani), Narathiwat, dan Yala memiliki penduduk yang mayoritas beretnis Melayu dan

---

<sup>1</sup> John Funston, *Government and Politics in Southeast*, Singapura: ISEAS, 2001, hlm. 333.

<sup>2</sup> CIA, "Thailand", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>, diakses tanggal 15 Januari 2017.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mohd Zamberi, *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Penerbit Hizbi), 1993, hlm. 233.



memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang wilayah Thailand Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Patani yang didirikan oleh orang-orang Melayu. Adapun waktu melakukan integrasi ke wilayah Thailand Selatan dimulai sejak Thailand masih bernama Siam yaitu pada abad ke 18, saat kerajaan Siam melakukan penaklukan atas wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, pada tahun 1930an terjadi revolusi di Thailand/Siam. Revolusi ini bertujuan untuk mengubah konstitusi di Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, meskipun kemudian akhirnya kekuasaan didominasi dari kalangan militer.<sup>6</sup> Kebijakan politik Thailand berubah seiring adanya pergantian sistem pemerintahan di Thailand akibat munculnya kekuatan militer yang menguasai pemerintahan. Pada tahun 1938, seorang Jenderal militer yang bernama Plaek Phibun Songkhram yang berasal dari Partai Rakyat Thailand terpilih sebagai Perdana Menteri. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand yang radikal terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Kebijakan PM Phibun yaitu orang-orang Melayu kini tidak lagi memiliki perwakilan di badan Pemerintahan Thailand Selatan akibat dihapuskannya sistem perwakilan kedaerahan dan diganti dengan sistem pemerintahan yang sentralistik.<sup>7</sup> Sistem pemerintahan Thailand yang sentralistik adalah kekuasaan daerah dipegang oleh pemerintah pusat.

---

<sup>5</sup> Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia), 1999, hlm. 42-50.

<sup>6</sup> BBC, "Thailand Army's Pivotal Role in Politics", <http://www.bbc.com/news/world-asia-27483816>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

<sup>7</sup> BAPPENAS RI, "Perkenalan Thailand", [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3\)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1\)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf), diakses tanggal 16 Januari 2017.

Bentuk penerapan dari sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut adalah adanya berbagai program pembaruan yang bertujuan untuk menggantikan identitas agama dan kultur orang Melayu Muslim dengan Budhaisme. Sementara itu di sektor pendidikan adanya larangan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sebagai pengganti bahasa Melayu adalah memakai bahasa Thai. Kebijakan Pemerintah Pusat Thailand juga mengharuskan pondok-pondok tidak hanya mengajarkan kurikulum sekuler di Thailand, melainkan juga harus memasukkan pelajaran etika Buddha.<sup>8</sup> Kemudian di bidang budaya adalah dengan diciptakannya mandat kebudayaan *Wiraihan* yang merupakan perundang-undangan nasional mengenai keberanian rakyat Thailand, sehingga peraturan-peraturan lokal yang berbasiskan Islam perlahan dihapuskan. Sementara dibidang hukum, Pemerintah Thailand menerapkan hukum kerajaan sebagai landasan hukum masyarakat Patani, perombakan stuktur pengadilan, penerjemahan dan pengkodifikasian hukum Islam agar tercipta keseragaman serta konsistensi dalam penerapannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya sistem pemerintahan yang sentralistik yang didasari dengan nasionalisme dan *chauvimisme* tersebut memunculkan masalah baru bagi penduduk Thailand Selatan. *Pertama*, dengan diisinya posisi pejabat pemerintahan daerah dan tentara serta polisi oleh orang-orang keturunan Thai-Budha telah membuat kesenjangan sosial di wilayah Thailand Selatan. *Kedua*, adanya penggunaan bahasa Thai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Choirul Fuad Yusuf dkk, *Dinamika Islam: Filipina, Burma Dan Thailand*, (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2013, hal. 343.

sebagai bahasa nasional telah membuat komunikasi antara masyarakat Melayu dengan para pejabat daerah terhambat. Ketiga, banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi Thai terhadap orang-orang Melayu di wilayah tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan/perbedaan antara golongan birokrat berketurunan Thai dengan orang-orang Muslim-Melayu yang diperintah.<sup>10</sup> Oleh karena itu, muncul rasa tidak suka dari masyarakat lokal di Thailand Selatan terhadap Pemerintah Pusat Thailand, yang terus meningkat hingga muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat Thailand. Perlawanan yang paling serius terhadap Pemerintah Thai berasal dari gerakan Muslim-Melayu di provinsi Patani, Narathiwat, dan Yala.

Bentuk perlawanan dari kelompok Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thai dimulai pada awal tahun 1947. Haji Sulong Abdul Kadir, Ketua Dewan Agama Pattani, mengajukan petisi tujuh poin kepada pemerintah atas nama Gerakan Rakyat Patani yang baru dibentuk. Petisi itu menuntut beberapa hal, yakni;

- 1) Penunjukan gubernur terpilih harus merupakan penduduk lokal untuk empat provinsi selatan.
- 2) Kuota delapan puluh persen dari semua pegawai negeri untuk Muslim.
- 3) Penggunaan bahasa Thailand dan Melayu sebagai bahasa resmi,
- 4) Bahasa Melayu sebagai pengantar di sekolah dasar.
- 5) Pengakuan hukum syariah dan pengadilan Muslim yang terpisah.
- 6) Kontrol atas pendapatan dan pengeluaran untuk provinsi selatan.

---

<sup>10</sup> Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Selangor: Hizbih), 1993, hlm. 227-228.



- 7) Penciptaan Dewan Muslim untuk mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan adat dan upacara Muslim.<sup>11</sup>

Sebuah petisi yang berisi tuntutan serupa telah dibuat oleh para pemimpin Muslim Melayu di Narathiwat, dan juga oleh Muslim Melayu di Satun. Tindakan yang dilakukan para pemimpin Muslim Melayu di Narathiwat dan Satun dilakukan pada waktu yang bertepatan dengan kudeta Marshal Phibun pada bulan November 1947. Bahkan pada bulan Desember tahun 1947, satu pemimpin Muslim Melayu di pengasingan di Kelantan menyatakan Patani independen.

Pada bulan Januari 1948, pemerintah Thailand menanggapi kejadian tersebut dengan menangkap Haji Sulong dan para pendukungnya dan mendakwa mereka dengan makar. Akibatnya, para pemimpin Muslim Melayu segera menarik diri dari pertemuan-pertemuan dengan para pejabat Thailand dan menghasut boikot pemilihan nasional yang dijadwalkan akhir tahun 1948. Pada 3 Maret 1948 Patani nasionalis di pengasingan di Kelantan membentuk organisasi separatis pertama yang dinamai dengan *Thailand League Melayu Greater Patani* (Gabungan Melayu Patani Raya atau GAMPAR).<sup>12</sup> Selama periode tahun 1953-1954 gerakan nasionalis Muslim Melayu melemah setelah kematian Haji Sulong dan para pemimpin GAMPAR. Hal ini dikarenakan, menurut ulama Thai Thanet

---

<sup>11</sup> James Ockey, Individual Imaginings: The Religio-Nationalist Pilgrimages of Haji Sulong Abdulkadir al-Fatani, *Journal of Southeast Asian Studies, The National University of Singapore*, Volume 42, 2011, hlm. 89-119 .

<sup>12</sup> Dennis P. Walker, Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005, *Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand*, *Islamiyyat* 27(1), 2005, hlm. 81 – 117.

Aphornsuvan, kepemimpinan Haji Sulong, telah menyusun kembali nasionalisme etnis Melayu dalam ikatan Islam”.<sup>13</sup>

Awal konflik antara militer Thailand dan kelompok perlawanan Muslim Melayu dimulai pada tahun 1960 di Thailand, dengan munculnya kelompok perlawanan yang dibentuk oleh Ustad Haji Abdul Karim Hassan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas peraturan Pemerintah Thai yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan mengadopsi pendidikan sekuler. Ustad Haji Abdul Karim Hassan membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960. Dalam perjuangannya, BRN tidak hanya mengusung ideologi Islam, namun juga mengusung ideologi nasionalisme Melayu dan sosialisme. Hal ini dikarenakan BRN memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Malaya.

Meskipun perlawanan-perlawanan BRN melalui aksi bersenjata cukup berhasil mengusik stabilitas di Thailand Selatan, akan tetapi gerakan BRN tidak pernah menjadi sebuah ancaman regional yang serius. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan dari rakyat Thailand Selatan itu sendiri, khususnya dari kalangan Muslim Konservatif yang tidak cocok dengan ideologi sosialis (sayap kiri) yang juga ikut diusung oleh BRN. Oleh karena minimnya perlawanan terhadap Pemerintah Thai, sekelompok orang kemudian berinisiatif membentuk kelompok pemberontak yang baru.

Kelompok perlawanan yang baru tersebut dinamakan *Patani United Liberation Organization* (PULO) atau Pertubuhan Persatuan Pembebasan Pattani

---

<sup>13</sup> James Ockey, *Individual Imaginings*, hlm. 97.

(PPPP). Organisasi PULO dibentuk pada tanggal 22 Januari 1968 oleh Tengku Bira Kotanila bersama Harun Muleng.<sup>14</sup> Organisasi ini memiliki sistem pengorganisasian yang lebih efektif. Basis pendukungnya lebih luas, tersebar di kota-kota maupun di desa-desa. Landasan ideologinya dikenal dengan istilah *Ubang Tapekema*, yang merupakan singkatan dari Agama, Bangsa, Tanah Air, dan Perikemanusiaan. Dengan landasan ideologi yang demikian ini PULO mampu merangkul semua golongan dan lapisan dalam masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan.<sup>15</sup> Selain itu, PULO juga mampu membangun jaringan internasional yang luas dari Arab Saudi hingga Libya. Organisasi ini berada dibawah kepemimpinan kaum intelektual muda yang lebih terorganisir dan militan dan mendapat dukungan finansial dari Syria dan Libya.<sup>16</sup>

Dalam kasus gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, faktor-faktor ras, bahasa, agama, adat istiadat, dan kesadaran akan suatu identitas kolektif yang khas, telah dimobilisasikan untuk memperkuat solidaritas kolektif dalam melawan setiap upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan pemerintah Thailand. Gerakan Melayu Muslim di Thailand Selatan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan kesejarahan, dimana sejumlah aktor memperjuangkan hak kesejarahan mereka sebagai bangsa.

Hal yang membedakan PULO dengan kelompok maupun organisasi perlawanan Muslim Melayu lainnya yaitu terletak pada cara yang dipakai dalam melakukan perlawanannya. Selain melakukan perlawanan bersenjata PULO juga

---

<sup>14</sup> Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, hlm. 325.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Ampel Press), 2004, hlm. 268-230.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 313.

gencar melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan penduduk lokal. Hal ini kemudian berhasil menarik minat masyarakat lokal Thailand Selatan terhadap gerakan perlawanan PULO. Selanjutnya, gerakan perlawanan PULO berhasil berkembang menjadi kelompok pemberontak terbesar di Thailand. Ini ditunjukkan dimana pada tahun 1978, PULO berhasil memobilisasi 70.000 orang untuk turun ke jalan melakukan serangkaian demonstrasi menuntut pemerintah yang otonom bagi wilayah Patani.

Berdasarkan fenomena gerakan Islam dan khususnya cara yang dipakai oleh kelompok PULO di atas, maka dengan alasan tersebut penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan mengkaji. Sehingga, fokus penelitian ini tertuju pada gerakan kelompok PULO terhadap Pemerintah Thailand pada periode tahun 1968 hingga 1980.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah Thai adalah inti dari penelitian ini. Untuk batasan waktu, penelitian ini mengambil jangka waktu dari tahun 1968 sebagai tahun dibentuknya PULO hingga tahun 1980 yang mana gerakan PULO mulai mencapai titik-titik keberhasilan menjadi kelompok pemberontak terbesar di Thailand. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami pelebaran dan tetap fokus pada kajian awal, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya kelompok PULO?
2. Bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap Pemerintah Thailand pada tahun 1968-1980?
3. Apa saja capaian dari gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah Thailand pada tahun 1968-1980?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi dibentuknya organisasi PULO.
2. Untuk memahami gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan kelompok PULO terhadap Pemerintah Thailand.
3. Untuk mengetahui capaian-capaian yang diraih oleh kelompok PULO dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi kajian tentang sejarah Islam di Thailand Selatan, dan khususnya di Patani.
2. Memberi gambaran mengenai pengaruh nilai-nilai Islam dalam sistem sosial pada setiap bidang kehidupan, yang dapat menjadi sumbangan pemikiran keagamaan bagi kalangan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan.



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang gerakan perlawanan Muslim di Thailand Selatan bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah buku maupun skripsi yang mengkaji mengenai perlawanan kelompok Muslim di Thailand Selatan baik dari aspek sejarah, sosiologi, budaya, maupun hukum. Adapun buku-buku maupun skripsi yang digunakan untuk mengetahui posisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Surin Pitsuwan berjudul Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani tahun 1989. Buku ini secara umum membahas gerakan perlawanan masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Secara khusus, buku ini menguraikan mengenai upaya integrasi Pemerintah Thailand yang berkaitan dengan pondok-pondok orang Muslim yang diubah menjadi sekolah swasta dengan kurikulum sekuler, serta upaya menempatkan orang-orang Budha di wilayah Thailand Selatan. Sementara itu penelitian ini lebih khusus membahas gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah di Thailand Selatan.

*Kedua*, buku Mohd. Zamberi A, Malek yang berjudul Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik tahun 1993. Buku ini menjelaskan secara detail mengenai program-program pembaruan dari Pemerintah Thailand terhadap wilayah Thailand Selatan. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai latar belakang pembentukan kelompok-kelompok perlawanan di Thailand Selatan secara umum. Berbeda dengan karya Malek, penelitian ini terbatas meneliti secara mendalam tentang kelompok PULO dan bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Wilda Darnela Adiwildan yang berjudul *Proses Integrasi Patani ke Dalam Teritori Thailand 1902-1932*. Dalam kajian ini membahas mengenai sejarah dari provinsi Patani sebelum dan hingga masuknya menjadi salah satu wilayah Thailand. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini menempatkan kelompok PULO sebagai objek penelitiannya. Kajian ini menjadi rujukan penulis dalam mengolah data untuk menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

*Keempat*, tulisan dari Malik Ibrahim dalam jurnal *Sosio-Religi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* yang berjudul *Seputar Gerakan Islam di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*. Dalam tulisan ini, penyusun mencoba membahas tentang Islam di Thailand, antara lain seputar sejarah Islam di Thailand, agama-agama yang dianut oleh masyarakat di Thailand, hubungan antara warga muslim Thailand dengan pemerintah, serta perkembangan Islam di Thailand dan hubungannya dengan sistem pendidikan nasional Thailand. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai PULO yang melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand.

#### **E. Landasan Teori**

Gerakan perlawanan kelompok PULO di Thailand Selatan merupakan bentuk perlawanan atas kolonialisme internal Thailand. Berdirinya PULO sebagai salah satu upaya masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan untuk meraih hak dalam menentukan nasibnya sendiri, dan sebagai bentuk solidaritas dari etnis Muslim-Melayu di Thailand. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan untuk

menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat Thai melalui aksi bersenjata dan gerakan sosial. Hal ini kemudian menimbulkan ketertarikan dalam diri masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan, dan membuat PULO menjadi kelompok perlawanan pemberontak terbesar di Thailand pada periode tahun 1968 hingga 1978.

Dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan teori konflik. Istilah konflik berasal dari kata Latin “*configere*” yang berarti saling memukul. Dalam pengertian sosiologi, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Robert M.Z. Lawang dalam bukunya yang berjudul Materi Pokok Pengantar Sosiologi, mengartikan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

---

<sup>17</sup> Robert M Z Lawang, *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka), 1994, hlm. 53.

Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.<sup>18</sup>

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik. Hal ini dikarenakan perebutan atas sumber-sumber daya alam di suatu wilayah/daerah yang mana merupakan sumber ekonomi kelompok masyarakat di wilayah tersebut, seperti minyak, gas, maupun hasil hutan atau laut. Selain itu, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat, seperti jabatan dalam suatu pemerintahan.<sup>19</sup> Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

- 1) Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk

---

<sup>18</sup> Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2001, hlm. 102.

<sup>19</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 360-362.

sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

- 2) Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.<sup>20</sup>

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka konflik yang terjadi merupakan konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Dalam hal ini konflik yang terjadi antara Pemerintah Thai dengan kelompok PULO sebagai kelompok masyarakat Muslim Melayu di Thailand. Sementara itu penyebab dari konflik tersebut adalah adanya

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 361.



kemajemukan horizontal. Hal ini ditunjukkan adanya kemajemukan di internal Thailand yaitu etnis Melayu dan Thailand sendiri, serta kemajemukan agama yaitu Islam dan Budha. Disamping itu juga, adanya upaya dari Pemerintah Thai untuk mempertahankan kebudayaan Thailand untuk seluruh wilayah Thailand. Sebagai akibatnya, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kultur dari mayoritas masyarakat di Thailand Selatan. Akibatnya kemudian timbullah gerakan perlawanan bahkan aksi bersenjata dari kelompok perlawanan PULO untuk menghadapi Pemerintah Thailand.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan jenis deskriptif analisis. Metode ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara historis.<sup>21</sup> Dalam penulisan dan pengolahan data, metode historis menggunakan empat langkah, yaitu;

- 1) Heuristik: yaitu pencarian dan pengumpulan sumber data baik dengan menggunakan sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber-sumber primer berupa informasi dari pelaku sejarah, naskah, foto, dan arsip. Sedangkan untuk melengkapinya, maka penulis menambahkan sumber sekunder dengan teknik *library research*

---

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, hlm. 54.

yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti buku, dokumen tertulis, majalah, jurnal, foto, dan kisah-kisah sejarah lainnya.<sup>22</sup>

- 2) Kritik: setelah sumber-sumber data dikumpulkan, kemudian penulis mengklasifikasikan keotentikan dan kredibilitas sebuah sumber data. Otentik dalam arti memilah mana sumber yang asli dan benar. Sedangkan kredibilitas berarti penyidikan kritis terhadap sumber-sumber yang ada agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan informasi.<sup>23</sup>
- 3) Interpretasi: analisis terhadap sumber-sumber data yang telah diteliti kredibilitasnya dan keotentikannya, dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Kemudian menemukan korelasi, jawaban, dan solusi baru atas tema yang dibahas dalam penelitian ini.
- 4) Historiografi: merupakan tahap akhir dalam prosedur penelitian sejarah, yakni merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian dengan memperhatikan aspek kronologi sejarah. Dimulai dengan terjadinya revolusi pemerintahan di Thailand, munculnya perlawanan dari Muslim Melayu di Thailand Selatan pada tahun 1960 hingga tahun 1978.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan di atas, maka tulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Secara ringkas sistematika penulisannya diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

<sup>23</sup> Nugroho Notokusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press), 1985, hlm. 80 dan 95.

**Bab I** pendahuluan yang menyajikan pembahasan pokok mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II** berisikan pembahasan mengenai situasi umum Patani di bawah Pemerintahan Thailand pra perlawanan kelompok PULO antara tahun 1920an hingga tahun 1960. Dalam bab ini juga memaparkan tentang kondisi masyarakat Muslim-Melayu Patani pada masa penerapan kebijakan asimilasi pemerintah Thailand. Tujuan bab ini untuk mengetahui kebijakan integrasi Pemerintah Thailand yang menjadi penyebab munculnya perlawanan dari kelompok-kelompok Islam.

**Bab III** berisi mengenai pembahasan gerakan perlawanan PULO dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap Pemerintah Thailand pada tahun 1960an hingga tahun 1978. Bab ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya PULO dan seperti apa gerakan perlawanan kelompok PULO beserta bentuk-bentuk perlawanannya terhadap pemerintah Thailand.

**Bab IV** berisi pemaparan mengenai keberhasilan kelompok PULO dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand, dan respon dari Pemerintah Thailand terhadap perlawanan tersebut.

**Bab V** Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sejarah wilayah Thailand Selatan berkaitan erat dengan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Wilayah Patani masuk dalam kedaulatan Thailand dimulai sejak tahun 1902 melalui kemenangan Kerajaan Siam (Thailand) atas Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam. Adanya upaya integrasi dari Pemerintah Thailand telah memicu rasa ketidakpuasan dari kaum Muslim-Melayu di Patani, Yala, Narathiwat, bahkan Songkhla. Hal inilah yang menjadi faktor utama munculnya berbagai macam kelompok/organisasi perlawanan Patani di Thailand Selatan. PULO adalah salah satu organisasi perlawanan di Thailand Selatan. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama yang menjadi alasan didirikannya PULO antara lain;

- 1) Adanya kebijakan asimilasi yang berlebihan dari Pemerintah Thailand, sehingga mendorong orang etnis Melayu agar melupakan bangsa dan bahasa ibu (asalnya).
- 2) Munculnya keinginan untuk mengembalikan masa kejayaan sewaktu masih berstatus Kesultanan Islam Patani, ini didorong adanya ketimpangan sosial di wilayah Thailand Selatan.

Kedua hal tersebut yang kemudian membuat PULO ikut hadir berperan dalam situasi politik domestik Thailand. Dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand, PULO menggunakan dua cara, yaitu cara kekerasan yang

diwujudkan dengan terror bom serta tindakan angkatan bersenjata. Cara ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan di dalam negeri Thailand. Sedangkan yang kedua adalah cara non kekerasan, seperti memberikan pelajaran dan bahan bacaan mengenai sejarah Patani, Sejarah Islam, ajaran-ajaran keIslaman, dan sebagainya, langsung kepada masyarakat melalui masjid dan pondok-pondok. Cara ini bertujuan untuk menciptakan basis-basis massa PULO sehingga dapat meraih kemerdekaan.

Di sisi lain, Pemerintah Thailand terlihat kerepotan menanggapi maupun menghadapi kelompok-kelompok perlawanan yang bersenjata di wilayah Selatan Thailand. Hal ini yang membuat militer Thailand mengambil tindakan yang represif. Akibatnya, muncul rasa tidak suka dikalangan masyarakat etnis Muslim-Melayu di Thailand. Sebagai upaya tetap menjaga kestabilan keamanan dalam negerinya, Pemerintah Thailand mengubah pendekatannya untuk menyelesaikan konflik dengan PULO dan kelompok perlawanan lainnya. Pemerintah Thailand lebih cenderung memakai kebijakan yang akomodatif dengan memberikan hak-hak yang luas bagi masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan.

Di pihak Pemerintah Thailand, Jenderal Prem yang menjabat sebagai perdana menteri Thailand, tampaknya sangat memahami kepentingan dari banyaknya kelompok pemberontakan di Thailand, termasuk PULO. Dengan berlatarbelakang kehidupan di Thailand Selatan, Jendral Prem ikut merasakan keinginan dasar dari masyarakat Muslim-Melayu di Patani, Yala, dan Narathiwat. Oleh sebab itu, Jenderal Prem mengambil inisiatif dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Hal tersebut dilakukan



setidaknya dapat mengurangi gejolak pemberontakan sehingga terhindar dari jatuhnya korban jiwa.

Di pihak lain, perubahan sikap Pemerintah Thailand terhadap gerakan perlawanan di Thailand menjadi keberhasilan besar bagi PULO. Pemerintah Thailand telah menyediakan Badan Otonomi Khusus yang berperan untuk menjawab permasalahan sosial dan administrasi masyarakat di wilayah Thailand Selatan. Perlawanan PULO juga telah menunjukkan keberhasilan dengan menjadi populernya PULO ditingkat nasional hingga internasional sebagai suatu organisasi perjuangan Islam Melayu.

## **B. Saran**

Setelah membahas mengenai gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap Pemerintah Thailand dan menarik kesimpulan, maka di akhir penulisan ini, peneliti mengambil kesempatan untuk mengemukakan beberapa saran, yaitu;

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi generasi penerus bangsa Patani untuk memiliki kesadaran dalam menghadapi berbagai bentuk pengaruh yang menyebabkan lemahnya nilai-nilai keagamaan Islam dan kebudayaan Melayu pada jaman globalisasi saat ini, karena kedua hal tersebut merupakan identitas/jati diri yang sebenarnya.
2. Terkait konflik yang masih mendera wilayah Thailand Selatan, ada baiknya untuk kembali melihat kebijakan yang diambil oleh Jenderal Prem. Sebagai pemimpin sebuah negara, dia dapat menempatkan dirinya

diantara tugasnya sebagai warga negara dan pribadi/jati dirinya yang besar di lingkungan masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan.

3. Bagi para penulis lain, ada baiknya untuk melakukan penelitian secara khusus terkait pergerakan kaum Muslim sebagai minoritas di suatu negara. Tujuannya agar dapat mengetahui dan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan mereka sebagai minoritas di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999.
- Ahmad Omar Capakiya, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1992-2002*, (Kuala Lumpur: UKM), 2002.
- Funston, John, *Government and Politics in Southeast*, (Singapore: ISEAS), 2001.
- Lawang, Robert M.Z., *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka), 1994.
- Lauer, Dr. Robert H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2001.
- Mahmud, Nik Anuar Nik, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia), 1999.
- Malek, Mohd Zamberi A., *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Malaysia: Hizbih), 1993.
- Notosusanto, Nugroho, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press), 1985.
- Nurdi, Herry, *Perjuangan Muslim Patani: Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, (Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise), 2010.
- Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES), 1993.
- Satha-Anand, *Islam and Violence: A Case Study of Violent Events in The Four Southern Provinces, Thailand, 1976-1981*, (Tampa: University of South Florida), 1986.
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.
- Shaikh, Farzana, *Islam and Islamic Groups: A Worldwide Reference Guide*, (London: Longman UK Group Ltd), 1992.

Siddiqi, Sharon, dan Taufik Abdullah, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES), 1989.

Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Ampel Press), 2004.

Yusuf, Choirul Fuad dkk., *Dinamika Islam: Filipina, Burma Dan Thailand*, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

Zainuddin, M., Ehsa Roibin, dan M. In'am, *Memadu Sains dan Agama, Menuju Universitas Islam Masa Depan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang), 2004.

#### **Jurnal :**

Dulyakasem, Uthai, Muslim Malay Separatism in Southern Thailand: Factors Underlying the Political Revolt, dalam Lim Joo-Jock, *Armed Separatism in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS), 1984, hlm. 231.

Farouk, The Historical and Transnational Dimensions of Malay-Muslim Separatism in Southern Thailand, dalam Lim Joo-Jock dan S. Vani (eds), *Armed Separatism in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS), 1984, hlm. 239–240.

Haemindra, The Problem of the Thai Muslims in the Four Southern Provinces of Thailand, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 7 No. 2, 1976, hlm. 213.

International Crisis Group, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, (Singapura: ICG), *Asia Report*, N°98 – 18 May 2005, hlm. 10.

Jamaluddin, Gerakan Pembebasan Islam Patani di Thailand Selatan Studi terhadap Patani United Liberation Organization (1968-1993), *Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 117-134.

Ockey, James, Individual Imaginings: The Religio-Nationalist Pilgrimages of Haji Sulong Abdulkadir al-Fatani, *Journal of Southeast Asian Studies*, The National University of Singapore, Volume 42, 2011, hal 89-119.

Satha-Anand Chaiwat, *Defending Community: Strengthening Civil Society A Muslim Minority's Contribution to Thai Civil Society*, (Singapura: Institute Of Southeast Asian Studies), 2001, hlm. 12.

Walker, Dennis P., *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005, Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand*, *Islamiyyat* 27(1), 2005, hal 81 – 117.

**Laporan :**

Kementerian Kehakiman, *Karn Sammana Karn Chai Kodmai Thai Nai Khet Cangwad Patani, Yala lea Satun*, (Bangkok: Kementrian Kehakiman), 1982.

**Website :**

“ต่อขอลความกิด นำชีวิตด้วยอิสลาม”, <http://www.islaminthailand.org/dp6/>, diakses tanggal 15 Januari 2017.

CIA, “Thailand”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>, diakses tanggal 15 Januari 2017.

Human Right Wacth, “A Brief History of Insurgency in the Southern Border Provinces”, <https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/3.htm>, diakses tanggal 8 Mei 2017.

“Perkenalan Thailand”, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri\(3\)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional\(1\)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri(3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional(1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf), diakses tanggal 16 Januari 2017.

Maisonti, Thammanoon, A Proposal To Address The Emerging Muslim Separatist Problem In Thailand”, <https://www.hsdl.org/?view&did=450923>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Noiwong, Ornanong, *Political Integration Policies and Strategies of the Thai Government Toward the Malay-Muslims of Southern most Thailand (1973-2000)*, PhD dissertation, Illinois: Northern Illinois University), 2001.

BBC, “Thailand Army's Pivotal Role in Politics”, <http://www.bbc.com/news/world-asia-27483816>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.



## WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana bisa terbentuk PULO?

PULO muncul dikarenakan adanya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat di wilayah Thailand Selatan, termasuk dalam Pendidikan, budaya, dan ekonomi, maupun kekuasaan politik.

2. Apa yang membuat ketertarikan Anda ikut serta dalam perjuangan PULO?

PULO sebagai cerminan perlawanan masyarakat Muslim Patani yang merasa mendapatkan diskriminasi dari Pemerintah Thailand saat itu, sehingga rasa kebersamaan dalam budaya maupun agama Islam menjadi nilai yang diusung PULO bersama kami.

3. Nilai-nilai apa saja yang diusung oleh PULO?

Budaya Melayu dan agama Islam dari masyarakat Patani

4. Seperti apa bentuk perlawanan PULO?

PULO sejak dulu melawan dengan perlawanan menggunakan senjata secara bergerilya. PULO juga membangun jaringan dukungan dari luar Thailand.

5. Apa keberhasilan yang didapatkan PULO?

Pulo dapat mengumpulkan banyak dukungan dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan pasukan militernya.

6. Bagaimana respon Pemerintah Thailand dalam menghadapi Perlawanan PULO?

Merespon dengan cara militer.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Mr. Furkorn Chemaë  
Tempat/Tanggal Lahir : Yala, Thailand/ 13 September 1993  
Nama Ayah : Abdulfarid Chemaë  
Nama Ibu : Habeebah Chemaë  
Asal Sekolah : Islamic College of Thailnad  
Alamat Rumah : 131 M.2 Santirat Road T.Yaha A.Yaha  
Ch.Yala  
Alamat Kost : 1010 Jl.Veteran Rw. 09 Rt.37  
Warungboto, Yogyakarta  
E-mail : [Faira\\_xit@hotmail.com](mailto:Faira_xit@hotmail.com)  
No. HP : 082138284585

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Sekolah Ban Yaha School :1996-1998
2. SD : Sekolah Ban Yaha School : 1998-1999
3. SMP :Phattana Wittaya Yala School : 2005-2008
4. SMA : Islamic College of Thailnad School Bangkok : 2008-2011

### C. Organisasi

- Anggota : Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI) Tahun 2012